

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang kaya akan aset tepi laut, kelautan, dan perikanan. Kawasan tepi laut juga mempunyai potensi yang dapat diciptakan di beberapa kawasan wisata bahari. Masyarakat yang tinggal di kawasan tepi laut sudah lama mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ditemukan di sekitar pantai.

Indonesia sebagai negara emerging yang memiliki kekayaan melimpah hendaknya mempunyai tujuan dan harapan dalam meraih kesuksesan dan kesuksesan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki secara sungguh-sungguh dan seefektif mungkin melalui proses kemajuan dan perbaikan terus-menerus yang disebut kemajuan sebagaimana tertuang dalam konstitusi. pada tahun 1945. Sejak dilaksanakannya kerangka kemerdekaan provinsi pada tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2014, telah memberikan kesempatan kepada DPRD provinsi untuk mengurus urusan pemerintahan daerah sesuai aturan kemerdekaan dan membantu urusan dengan standar kemerdekaan. kemerdekaan sebesar-besarnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik. Indonesia. Kemerdekaan provinsi merupakan sebuah pintu terbuka sekaligus ujian yang harus diwaspadai oleh otoritas publik. Kemerdekaan provinsi memberikan peluang yang luas bagi DPRD untuk mengkaji kemampuan daerah dalam meningkatkan gaji daerah.

Badan legislatif provinsi seharusnya membatasi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dalam hal administrasi pendapatan dan konsumsi wilayah. Dari berbagai sumber pendapatan pilihan yang dapat dikumpulkan oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi menetapkan penilaian dan tugas daerah menjadi satu sumber yang berasal dari dalam daerah dan dapat diciptakan oleh negara bagian di setiap kabupaten (Sarmila, dkk, 2017:360 ). Bekerja pada sifat administrasi lokal. Bea daerah adalah jenis pendapatan yang paling mungkin dihasilkan berdasarkan kemajuan yang dilakukan oleh administrasi negara teritorial karena mereka diizinkan untuk mengumpulkan kebutuhan. Peluang yang dimaksud dalam bidang tugas daerah berkaitan dengan administrasi atau kantor pengganti yang diberikan oleh daerah. Penyelenggaraan tol yang merupakan sumber pendapatan daerah harus diawasi secara ahli sesuai metode material. Artinya, para pejabat dewan harus saling menjunjung tinggi tugas dan kewajibannya dalam menjalankan kewajiban dan komitmennya masing-masing.

Daerah-daerah di Wilayah Indonesia diberi pilihan untuk melakukan kemandirian wilayah dengan memberikan kekuasaan yang luas, sejati, dan cakap serta dapat menjamin kelancaran dan kemajuan daerah provinsi. Penyerahan tenaga ahli yang dimaksud relatif selesai, yang dibuktikan dengan pembinaan yang adil, peruntukan dan penggunaan aset negara, serta penyesuaian dana lokal dan fokus. Alasan diberikannya kemandirian adalah untuk perbaikan dari sudut pandang yang luas yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan standar investasi daerah,

pemerintahan mayoritas, korespondensi, potensi, pemerataan dan keragaman provinsi dalam masyarakat. sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi kemandirian daerah adalah sebuah metode untuk mengembangkan lebih lanjut administrasi dan mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah daerah.

Peningkatan ini menjadikan cadangan dimana asetnya berasal dari berbagai daerah, salah satunya dari tuntutan biaya. Balas dendam merupakan suatu tol sebagai angsuran atas suatu pemanfaatan dengan imbalan langsung. Angsuran yang dilakukan pembayar diharapkan semata-mata untuk mendapatkan prestasi tertentu dari otoritas publik. “Undang-undang tidak resmi Nomor 66 Tahun 2001 tentang Tol Provinsi memberi makna bahwa pedoman wilayah mengenai tugas daerah diumumkan dalam terbitan berkala provinsi yang berlaku.”

Retribusi yang akan dibacakan adalah tarif tol kawasan wisata Samudera Sulamanda, dalam hal ini komitmen bea daerah pada Bayaran Teritorial Unik Rezim Kupang. Gaji Unik Teritorial adalah pendapatan dari permintaan penilaian lokal, tol provinsi, berlanjut dari organisasi lokal, penerimaan dari kantor-kantor pemerintah dan pendapatan lain-lain yang diingat untuk Gaji Unik Lokal (Bantalan) yang berlaku.

Untuk itu, permintaan pendapatan di bidang pariwisata dapat tercipta di Pemerintahan Kupang mengingat jumlah destinasi wisata yang semakin banyak. Rezim Kupang dikenal sebagai salah satu pemerintahan di Kawasan Nusa Tenggara Timur yang mendapat penolakan sangat besar dari industri

perjalanan. Inilah salah satu alasan wisatawan asing dan lokal untuk berkunjung. Hal ini dapat dilihat pada tabel terlampir.

**Tabel 1.1**  
**Data Kunjungan Wisatawan**  
**Manca Negara dan Wisatawan Lokal**

Tahun	Jumlah Wisatawan		Total
	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Lokal	
2018	567	3.357	3.562
2019	612	4.307	4.367
2020	638	3.658	3.775
2021	938	4.709	1.502
2022	1.084	10.814	1.817

*Sumber data : Kantor Desa Mata Air*

Pada Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah tamu wisatawan di Samudera Sulamanda selama tahun 2020-2022. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan juga berdampak pada peningkatan pendapatan asli kota Mata Air dari sektor pariwisata.

Penerimaan Retribusi Pantai Sulamanda masa covid-19. Dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah**  
**Penerimaan Retribusi Pantai Sulamanda**  
**Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Wisatawan	Jumlah Penerimaan Retribusi (RP)
1	2018	12.566.000
2	2019	14.325.000
3	2020	Rp 21.345.000
4	2021	Rp 28.235.000
5	2022	Rp 59.490.000

*Sumber data : Kantor Desa Mata Air*

Data pendapatan asli desa Mata Air dari sektor Pariwisata Sulamanda hanya berasal dari satu sektor, seperti Retribusi karcis masuk dan juga retribusi parkir.

Sesuai latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “**Analisis Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dari masalah utama penelitian, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana gambaran umum perencanaan retribusi objek wisata Pantai Sulamanda?
2. Bagaimana pengelolaan retribusi kawasan wisata Pantai Sulamanda dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah?
3. Berapa besar retribusi yang diperoleh objek wisata Pantai Sulamanda?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui gambaran umum perencanaan retribusi objek wisata Pantai Sulamanda.
2. Untuk mengetahui administrasi sisi Sulamanda Ocean, wilayah industri perjalanan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan di dekatnya dalam pemerintahan Kupang.
3. Mengetahui besar retribusi yang diperoleh oleh Pantai Sulamanda.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Pemeriksaan ini seharusnya memberikan keuntungan yang menyertainya:

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran kepada pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya para Ketua DPRD dan DPRD Kabupaten Kupang.
  - b. Sebagai sumber data bagi Budaya Pemerintahan Kupang dalam mengawasi pengeluaran destinasi liburan sisi Samudera Sulamanda.
  - c. Analis diharapkan memperoleh wawasan dan menerapkan informasi yang diperoleh dari eksplorasi yang dilakukan.
2. Manfaat Teoritis
- a. Konsekuensi dari penelitian ini diterima untuk memiliki opsi untuk menyumbangkan kontemplasi dalam perkembangan sains, terutama yang terkait dengan permintaan para pemimpin.
  - b. .Penelitian ini diyakini dapat menjadi acuan bagi para ilmuwan masa depan untuk kemajuan ilmu pengetahuan.